

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI BALI 2012

<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**
BPS - STATISTICS OF BALI PROVINCE

STATISTIK PERUMAHAN

PROVINSI BALI 2012

HASIL SUSENAS 2012



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

STATISTIK PERUMAHAN

PROVINSI BALI TAHUN 2012

No. Publikasi : 51520.1303
Katalog BPS : 3303002.51
Ukuran Buku : 21 cm × 28 cm
Jumlah Halaman : 56 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh:

BPS Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

Editor : Indra Susilo, DPSc, MM

Penulis : Dewa Ayu Eka Sumarningsih, M.Stat.

Pengolah Data : Mulyani Puji Lestari, SST.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Bali 2012 merupakan kelanjutan dari Statistik Perumahan tahun 2011 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data, baik pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan maupun masyarakat umum. Statistik perumahan yang disajikan menggambarkan kondisi perumahan dari sisi kualitas dan fasilitas di Provinsi Bali tahun 2012. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2012 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pembahasan yang disajikan dilakukan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik.

Meskipun publikasi ini telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca dan pengguna data merupakan bahan rujukan dan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi mendatang. Atas perhatian dan bantuan dari semua pihak, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Denpasar, September 2013
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Kepala,

Ir. I Gde Suarsa, MSi
NIP. 19550628 197903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	3
1.4. Sistematika Penyajian	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Sumber Data	5
2.1.1. Data yang Digunakan	5
2.1.2. Kerangka Sampel	5
2.1.3. Desain Sampel	6
2.1.4. Metode Pengumpulan Data	6
2.2. Konsep dan Definisi	7
2.3. Metode Analisis	14
BAB III Ulasan Singkat	15
3.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal	15
3.2. Kualitas Bangunan Rumah Tempat Tinggal	18
3.2.1. Luas Lantai	19
3.2.2. Jenis Lantai Terluas	20
3.2.3. Jenis Atap Terluas	21
3.2.4. Jenis Dinding Terluas	22
3.3. Fasilitas Rumah	22
3.3.1. Sumber Penerangan	23

3.3.2. Sumber Air Minum	25
3.3.3. Fasilitas Buang Air Besar	27
BAB IV PENUTUP	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Saran dan Rekomendasi	32
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012.....	16
Tabel 3.2.	Persentase Rumah Tangga menurut Indikator Perumahan di Provinsi Bali Tahun 2012	18
Tabel 3.3.	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Bali Tahun 2012	23
Tabel A.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012	35
Tabel A.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012	36
Tabel A.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012	37
Tabel A.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Bali Tahun 2012	38
Tabel A.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Bali Tahun 2012	39
Tabel A.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Bali Tahun 2012	40
Tabel A.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi Bali Tahun 2012	41
Tabel A.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Air Minum di Provinsi Bali Tahun 2012...	42
Tabel A.9.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Fasilitas Buang air Besar di Provinsi Bali Tahun 2012	43

Tabel A.10.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Bali Tahun 2012	44
Tabel A.11.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset di Provinsi Bali Tahun 2012	45
Tabel A.12.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Bali 2007-2011	46

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012.....	20
Gambar 3.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2012.....	24
Gambar 3.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Bali Tahun 2012.....	26
Gambar 3.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Kabupaten/Kota dan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Bali Tahun 2012.....	28
Gambar 3.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Bali Tahun 2012	29
Gambar 3.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset di Provinsi Bali Tahun 2012.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Papan atau perumahan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar, selain pangan dan sandang. Rumah menjadi kebutuhan dasar terkait dengan peran penting yang dimilikinya, seperti dapat melindungi manusia dari gangguan luar, melindungi dari penularan penyakit, serta yang tidak kalah penting adalah tempat untuk tumbuh dan berkembang. Mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, maka negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Kondisi perumahan (karakteristik perumahan) dapat menjadi ukuran kesejahteraan suatu rumah tangga. Beberapa penelitian mengenai kemiskinan dan beberapa program penanggulangan kemiskinan telah memasukkan beberapa karakteristik perumahan sebagai pendekatan indikator. Contohnya adalah dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005. Pada saat itu penentuan rumah tangga penerima BLT didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga (yang dikenal dengan 14 variabel penentu rumah tangga penerima BLT), yang diantaranya adalah karakteristik perumahan, seperti luas lantai rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding rumah, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, serta sumber penerangan.

Gambaran kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan kondisi kesehatan penghuninya. Menurut Keman (2005) rumah harus sehat agar penghuninya dapat bekerja secara produktif. Selain itu gambaran kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan keberhasilan pembangunan perumahan serta memberi gambaran perkembangan pembangunan perumahan di suatu wilayah. Ketersediaan statistik perumahan diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam membuat kebijakan mengenai perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Data makro mengenai perumahan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Susenas secara rutin mengumpulkan data karakteristik perumahan dalam kelompok data pokok (Kor) dan kelompok data sasaran (Modul). Pengumpulan data perumahan rinci dalam kelompok Modul dilakukan sejak tahun 1986, seterusnya data modul ini dikumpulkan setiap tiga tahun. Selain itu untuk keperluan perencanaan pembangunan jangka pendek, beberapa variabel perumahan sejak tahun 1992 juga dipantau setiap tahun melalui Susenas dalam kelompok data pokok (Kor). Dalam perkembangannya, pengumpulan data perumahan dan pemukiman Susenas disesuaikan dengan Pedoman Nasional Pendataan Perumahan dan Pemukiman (Domnasdat Rukim). Dengan pedoman tersebut diharapkan data yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan data atau informasi dari instansi lain.

Pada tahun 2013, BPS Provinsi Bali kembali membuat publikasi mengenai karakteristik perumahan dengan judul "***Statistik Perumahan Provinsi Bali 2012***". Publikasi ini merupakan kelanjutan dari publikasi mengenai perumahan "***Statistik Perumahan Provinsi Bali 2011***" dan "***Statistik Perumahan Provinsi Bali 2010***". Untuk menjaga kesinambungan data setiap tahun, data yang disajikan pada publikasi ini merupakan hasil pengolahan data Susenas Kor.

1.2. Tujuan

Penulisan publikasi ini bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi perumahan di Provinsi Bali dan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk Pemerintah Daerah khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan serta bahan perencanaan bagi pihak non pemerintah, seperti pihak swasta pengembang perumahan.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis mencakup berbagai karakteristik perumahan yang mencakup status penguasaan rumah tempat tinggal, kualitas sampai fasilitas rumah tempat tinggal di Provinsi Bali serta kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sumber data yang digunakan adalah Susenas Kor selama tahun 2012. Sama seperti tahun 2011, pengumpulan Susenas tahun 2012 juga dilakukan setiap triwulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Sampel Blok Sensus (BS) setiap triwulan berjumlah 144, dan setiap BS diambil 10 rumah tangga sampel, sehingga jumlah sampel Susenas Kor selama tahun 2012 mencakup 5.760 rumah tangga. Sampel rumah tangga tersebut tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali.

1.4. Sistematika Penyajian

Untuk memperoleh gambaran rinci serta mempermudah pembahasan, maka penulisan publikasi ini disajikan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, dan sistematika penyajian publikasi.

Bab II Metodologi

Menguraikan tentang sumber data yang digunakan yang meliputi kerangka sampel, dan metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi.

Bab III Ulasan Singkat

Membahas tentang status penguasaan rumah tempat tinggal, kualitas bangunan rumah tempat tinggal, dan fasilitas rumah tempat tinggal di

Provinsi Bali dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan publikasi.

<http://bali.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1. Sumber Data

2.1.1. Data yang Digunakan

Publikasi Statistik Perumahan tahun 2012 menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012. Susenas 2012 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari seluruh sampel rumah tangga tersebut, jumlah sampel rumah tangga Provinsi Bali berjumlah 5.760 rumah tangga yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Pelaksanaan lapangan dibagi menjadi empat triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember) sehingga setiap triwulan jumlah sampel sebesar 1.440 rumah tangga (5.760 rumah tangga dibagi ke dalam empat triwulan). Data hasil pencacahan setiap triwulan digunakan untuk estimasi angka level provinsi dan nasional, sedangkan data kumulatif (gabungan data Triwulan I sampai Triwulan IV) dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Dalam Susenas tahun 2012, data Kor (pokok) yang dikumpulkan mencakup keterangan umum ART, keterangan tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, keterangan sosial ekonomi lainnya, teknologi komunikasi dan informasi, serta keterangan sumber penghasilan rumah tangga. Keterangan perumahan sendiri mencakup penguasaan tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis dan luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar/energi utama untuk memasak.

2.1.2. Kerangka Sampel

Susenas 2012 menggunakan 3 kerangka sampel, yaitu

1. Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah

(wilcah) Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010, muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (*rural/urban*)

2. Kerangka sampel pemilihan tahap ke-dua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.
3. Kerangka sampel pemilihan tahap ke-tiga adalah daftar rumah tangga biasa tidak termasuk *institutional household* (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dsb) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 yang telah dimutakhirkan pada setiap menjelang pelaksanaan survei.

2.1.3. Desain Sampel

Metode sampling yang digunakan dalam Susenas adalah penarikan sampel tiga tahap berstrata. Tahap pertama dimulai dengan pemilihan wilcah yang dilakukan secara *pps* (*probability proportional to size*) dengan *size* banyaknya rumah tangga. Selanjutnya tahap ke-dua memilih blok sensus (BS) pada setiap wilcah terpilih yang dilakukan secara *pps* dengan *size* jumlah rumah tangga. Pemilihan wilcah dan BS dilakukan di BPS-RI. Tahap ke-tiga adalah memilih 10 rumah tangga biasa dari setiap blok sensus terpilih yang dilakukan oleh Pengawas (di BPS daerah). Pemilihan sampel rumah tangga dilakukan secara sistematis sampling berdasarkan hasil pemutakhiran listing rumah tangga.

2.1.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu, perlu diusahakan agar yang bersangkutanlah yang menjadi responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala

rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.2. Konsep dan Definisi

Mengingat data yang digunakan di dalam publikasi ini adalah Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

Rumah tangga, adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur maksudnya adalah jika pengaturan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama menjadi satu.

Status penguasaan bangunan tempat tinggal, dibedakan menjadi tujuh kategori:

Rumah milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah menjadi milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Rumah kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju jika diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Rumah sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Rumah bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga bersangkutan tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apa pun.

Rumah milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apa pun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.

Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

Atap, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya merasa terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Jenis atap dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:

Beton, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil dan pasir yang diaduk dengan air.

Genteng, adalah atap yang dibuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk juga genteng beton, genteng *fiber cement* dan genteng keramik.

Sirap, adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

Seng, adalah atap yang terbuat dari bahan seng.

Asbes, adalah atap yang terbuat dari campuran asbes dan semen.

Ijuk/rumbia, adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

Lainnya, adalah atap selain jenis yang disebutkan di atas, misalnya papan, bambu dan daun-daunan.

Dinding, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan menggunakan lebih dari satu jenis dinding maka yang dicatat adalah jenis dinding yang terluas, dan jika luasnya sama maka yang dicatat adalah yang nilainya lebih tinggi.

Tembok, adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen.

Kayu adalah dinding yang terbuat dari kayu.

Bambu, adalah dinding yang terbuat dari bambu, termasuk dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

Lainnya, adalah selain tembok, kayu, dan bambu.

Lantai, bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, papan, semen dan sejenisnya. Vinil atau karpet tidak dianggap sebagai bagian dari jenis lantai.

Luas lantai, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung) yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dihitung dalam luas lantai. Bila rumah dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai ruangan yang dipakai bersama dibagi dengan banyaknya rumah tangga ditambah dengan dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan. Untuk rumah bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas lantai dari semua tingkat yang ditempati.

Sumber air minum, adalah sumber air yang digunakan rumah tangga untuk minum dengan volume air paling banyak.

Air kemasan bermerk adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol atau gelas.

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk.

Dalam publikasi ini, air kemasan bermerk dan air isi ulang dimasukkan sebagai air dalam kemasan.

Air ledeng meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan

dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM, PDAM atau BPAM, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Air ledeng eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.

Air sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Mata air terlindung adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya, tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Lainnya, adalah sumber air selain di atas seperti air waduk/danau.

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat, adalah jarak antara sumber air minum yang berasal dari pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah, kotoran ternak, dan tinja yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga responden itu sendiri maupun tetangga.

Cara memperoleh air minum dikategorikan menjadi dua, yaitu:

Membeli, apabila membeli air untuk minum, seperti: ledeng dari

PAM/PDAM/BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah.

Langganan adalah apabila membeli air untuk minum secara periodik/bulanan.

Dalam publikasi ini, air minum yang diperoleh dengan cara membeli dan langganan dimasukkan sebagai membeli.

Tidak membeli adalah jika diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

Penggunaan fasilitas air minum adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa, tidak termasuk air kemasan bermerk, air isi ulang, dan ledeng eceran. Rumah tangga yang menggunakan air sungai, danau dan air hujan dianggap tidak mempunyai fasilitas, kecuali jika ada proses penjernihan yang dilakukan oleh suatu unit usaha atau rumah tangga dengan mesin penjernih air. Adapun penggunaan fasilitas air minum dibedakan dalam empat kategori:

Sendiri, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan saja.

Bersama, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Umum, jika fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk rumah tangga reponden.

Tidak ada fasilitas, jika rumah tangga bersangkutan tidak mempunyai fasilitas air minum, walaupun ada jaraknya > 2,5 km termasuk jika mengambil air langsung dari sungai atau air hujan.

Fasilitas buang air besar, adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan dalam empat kategori:

Sendiri, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

Bersama, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Umum, jika fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk rumah tangga responden.

Tidak ada, jika rumah tangga bersangkutan tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

Jenis kloset

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus dan dibedakan menjadi empat macam:

Leher angsa, adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan, adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke tempat pembuangan kotoran.

Cemplung/cubluk, adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan akhirnya.

Tidak pakai kloset, adalah jika jamban/kakus tidak memakai kloset.

Tempat pembuangan akhir tinja dibedakan menjadi:

Tangki/SPAL adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah ruta tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Pada beberapa jenis jamban/kakus yang

disediakan ditempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki.

Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah.

Sungai/danau/laut, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut.

Lubang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

Sumber penerangan, adalah penerangan yang biasanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan sehari-hari. Bila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, yang dicatat sebagai sumber penerangan adalah yang mempunyai nilai lebih tinggi. Sumber penerangan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.

Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Petromak/aladin, termasuk sumber penerangan dari minyak tanah, seperti petromak/lampu tekan, dan aladin (termasuk lampu gas).

Pelita/sentir/obor, termasuk lampu minyak tanah lainnya seperti lampu teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya.

Lainnya, termasuk lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri.

2.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam publikasi ini adalah analisis deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar/grafik. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis sederhana, tetapi dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Analisis deskriptif digunakan untuk mempermudah dalam penjelasan atau penafsiran keadaan suatu hal secara umum dengan membaca tabel atau grafik. Pada publikasi ini analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum kondisi perumahan di Provinsi Bali berdasarkan variabel-variabel yang telah dipilih.

<http://bali.bps.go.id>

BAB III

ULASAN SINGKAT

Rumah memiliki fungsi yang sangat penting, selain fungsi pokoknya sebagai tempat berlindung, rumah juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, serta aset bagi pemiliknya seperti yang tercantum di dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Berdasarkan fungsinya tersebut, sehingga Negara pun bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. WHO (*World Health Organization*) juga menyebutkan rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan dalam Keman, 2005).

Berdasarkan fungsi penting yang dimiliki rumah, maka rumah perlu didukung oleh dua aspek pendukung, yaitu kualitas rumah dan fasilitas rumah. Dalam bagian ini akan diulas secara singkat dua aspek penting tersebut, yaitu kualitas rumah tempat tinggal dan fasilitas rumah tempat tinggal. Disamping dua aspek tersebut, juga akan diulas mengenai status kepemilikan rumah (penguasaan tempat tinggal). Status kepemilikan tempat tinggal, kualitas rumah tempat tinggal, dan fasilitas rumah tempat tinggal dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan sebuah rumah tangga.

3.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal

Mengingat fungsi signifikan yang dimiliki oleh rumah, membuat rumah tangga atau individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, baik dengan cara membeli sendiri, menyewa, mengontrak, dan sebagainya.

Tabel 3.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Status Penguasaan Bangunan yang Ditempati						
	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Milik Org Tua/Sanak saudara	Lain nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Jembrana	86,85	1,69	0,78	1,21	0,36	9,11	0,00
02. Tabanan	87,65	3,51	3,66	2,37	0,10	2,72	0,00
03. Badung	67,88	6,29	18,94	1,52	2,80	2,57	0,00
04. Gianyar	84,00	3,22	7,17	0,69	0,42	4,50	0,00
05. Klungkung	91,29	2,23	0,92	0,58	0,00	4,98	0,00
06. Bangli	91,46	1,64	1,29	2,02	0,10	3,49	0,00
07. Karangasem	87,15	0,50	0,00	1,60	0,65	10,10	0,00
08. Buleleng	83,10	1,69	2,44	3,07	1,23	8,47	0,00
71. Denpasar	48,13	6,89	36,88	2,00	0,40	5,71	0,00
51. Bali 2012	75,00	3,77	12,74	1,85	0,84	5,81	0,00
2011	70,25	4,50	12,61	3,23	1,07	8,25	0,09
2010	71,28	5,47	12,27	2,55	0,48	7,60	0,34

Sumber : Susenas 2012

Dari Tabel 3.1. terlihat pada tahun 2012 sebagian besar rumah tangga di Provinsi Bali telah memiliki rumah sendiri yang besarnya mencapai 75 persen, sisanya berupa kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, milik orang tua/sanak saudara, dan lainnya. Rumah tangga yang memiliki rumah sendiri pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sekitar 4,75 persen dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai 70,25 persen. Selain kenaikan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri, rumah tangga yang menyewa rumah juga sedikit meningkat dibanding tahun 2011, yaitu dari 12,61 persen menjadi 12,74 persen.

Peningkatan rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali di sektor bangunan (konstruksi) yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Pada tahun 2009 pertumbuhan di sektor konstruksi hanya 0,91 persen, kemudian mengalami kenaikan yang sangat tinggi menjadi 7,37 persen pada tahun 2010, dan menjadi 7,88 persen pada tahun 2011 (lihat Lampiran Tabel A.12). Faktor pendukung lainnya adalah peningkatan pertumbuhan rumah tangga di Bali sebesar 2,31 persen dari tahun 2011 ke 2012 berdasarkan hasil Susenas. Selain itu, rumah juga dapat berfungsi sebagai aset bagi pemiliknya. Rumah mulai disadari oleh masyarakat sebagai investasi yang paling aman dan menguntungkan sehingga rumah tangga lebih memilih untuk memiliki rumah sendiri dibanding sewa, kontrak, dan sebagainya.

Tabel 3.1. juga memperlihatkan status penguasaan tempat tinggal rumah tangga di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali yang sebagian besar (lebih dari 60 persen) rumah tangganya tinggal di rumah milik sendiri, rumah tangga di Kota Denpasar yang tinggal di rumah milik sendiri hanya mencapai 48,13 persen. Hal ini diduga karena Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan pendidikan di Bali. Kondisi ini berimbas pada tingginya harga tanah dan rumah sehingga masyarakat tidak mampu membeli. Efek lanjutan dari berbagai kegiatan ekonomi dan pendidikan yang terkonsentrasi di Kota Denpasar adalah kedatangan para pendatang yang bertujuan untuk bekerja atau sekolah. Mereka umumnya bertempat tinggal sementara sehingga cenderung memilih menyewa (indekos) atau mengontrak sebagai alternatif tempat tinggal. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga di Denpasar yang mengontrak sebesar 6,89 persen dan yang menyewa (indekos) sebesar 36,88 persen. Angka ini merupakan angka tertinggi diantara kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

3.2. Kualitas Bangunan Rumah Tempat Tinggal

Rumah merupakan tempat berlindung terhadap gangguan dari luar yang umumnya didiami sehari-hari oleh anggota rumah tangga. Selain itu, rumah merupakan tempat berkumpul dan berinteraksi dalam sebagian besar waktu anggota tangga. Agar rumah menjadi tempat yang nyaman dan sehat untuk berinteraksi, rumah hendaknya memenuhi standar kesehatan. Untuk memenuhi standar kesehatan, pembangunan rumah dapat dimulai dari pemilihan kualitas bahan bangunannya. Seperti pemilihan jenis lantai, hendaknya dipilih lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan. Sebagai catatan, kualitas rumah dalam publikasi ini lebih ditekankan pada kualitas rumah dari sisi kesehatan.

Tabel 3.2. Persentase Rumah Tangga menurut Indikator Perumahan di Provinsi Bali Tahun 2012

Indikator Perumahan	Persentase
(1)	(2)
Luas lantai	
- Kurang dari 20 m ²	13,93
- 20 m ² atau lebih	86,07
Jenis lantai	
- Tanah	3,48
- Bukan tanah	96,52
Jenis atap	
- Ijuk/rumbia/lainnya	0,65
- Beton	1,89
- Genteng	77,96
- Sirap	0,17
- Seng	10,95
- Asbes	8,38
Jenis dinding	
- Bukan tembok	4,77
- Tembok	95,23

Sumber: Susenas 2012

3.2.1. Luas Lantai

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan adalah ukuran lantai rumah, yang nantinya digunakan untuk mengukur kepadatan hunian. Menurut Keputusan Menkes tahun 1999 bahwa rumah sehat meliputi tiga kelompok komponen penilaian, diantaranya adalah kelompok komponen rumah dengan salah satu aspeknya adalah luas bangunan rumah. Luas bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya atau disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan kepadatan penghuni. Hal ini tidak sehat, disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi akan mudah menular kepada anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan Tabel 3.2., pada tahun 2012 sebagian besar (86,07 persen) rumah yang ditempati oleh rumah tangga di Bali mempunyai luas lantai $\geq 20 \text{ m}^2$. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 3-4 orang, maka setiap anggota rumah tangga akan menempati minimal 5 m^2 atau dapat dikatakan setiap anggota rumah tangga cukup leluasa untuk beraktivitas dengan nyaman. Tingginya persentase rumah tangga di Bali yang menempati rumah dengan luas $\geq 20 \text{ m}^2$ merupakan suatu kewajaran mengingat struktur rumah di Bali yang umumnya masih banyak memakai konsep rumah tradisional yang terdiri dari beberapa unit bangunan.

Khusus untuk Kota Denpasar ternyata memiliki kondisi yang berbeda dengan kabupaten lain di Bali. Persentase rumah tangga di Kota Denpasar yang menempati rumah tinggal dengan luas lantai rumah $< 20 \text{ m}^2$ merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 31,41 persen (lihat Lampiran Tabel A.1.), diikuti oleh Kabupaten Badung (17,78 persen) yang menduduki posisi ke-dua. Hal ini disebabkan karena banyak rumah tangga di kedua daerah tersebut yang bertempat tinggal di rumah sewa (indekos) atau kontrak yang umumnya memiliki luas $< 20 \text{ m}^2$.

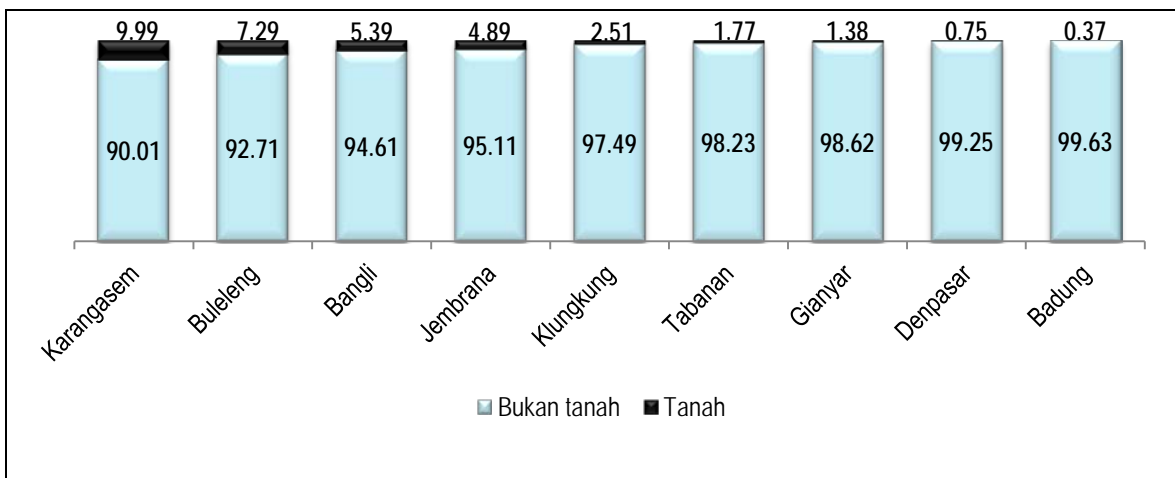
3.2.2. Jenis Lantai Terluas

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat menjadi indikator penilaian rumah sehat. Lantai dari tanah dianggap kurang memenuhi standar kesehatan karena jika musim hujan akan menjadi lembab yang dapat menjadi media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti diare, cacangan, dan penyakit kulit. Begitu juga ketika musim panas, lantai tanah akan lebih banyak mengeluarkan debu, yang juga dapat menjadi media penyebaran penyakit.

Tabel 3.2. memperlihatkan bahwa mayoritas (96,52 persen) rumah tangga di Bali memiliki rumah dengan lantai terluas bukan dari tanah, dan sisanya 3,48 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan lantai tanah. Jenis lantai yang termasuk bukan tanah adalah lantai dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, dan lainnya.

Selain sebagai indikator kesehatan, jenis lantai juga menjadi indikator kesejahteraan. Pada program pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada tahun 2005 dalam rangka membantu rumah tangga miskin akibat terjadinya kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), indikator menjadi salah satu dari 14 kriteria untuk menentukan kelayakan suatu rumah tangga untuk menerima BLT.

Gambar 3.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012



Sumber: Susenas 2012

Gambar 3.1. memperlihatkan Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng memiliki rumah tangga yang tinggal di rumah dengan lantai dari tanah yang paling banyak, yaitu masing-masing 9,99 persen dan 7,29 persen. Peran jenis lantai sebagai indikator kesejahteraan terlihat jelas ketika dikaitkan dengan kondisi kesejahteraan di kedua kabupaten tersebut. Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng adalah kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di Bali, dimana pada tahun 2011 kedua kabupaten ini termasuk bagian dari empat kabupaten dengan kemiskinan tertinggi di Bali.

3.2.3. Jenis Atap Terluas

Atap memiliki fungsi signifikan sebagai pelindung penghuninya dari hujan maupun panas. Mengingat pentingnya fungsi yang dimiliki oleh atap, maka jenis atap biasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal. Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga karena jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Di dataran tinggi, biasanya atap rumah memakai genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas daerah pantai, sedangkan masyarakat di dataran tinggi lebih memilih atap dari seng agar panas matahari yang diterima dapat disimpan dan dapat menghangatkan bagian dalam rumah.

Berdasarkan Tabel 3.2. sebagian besar rumah tangga di Bali tinggal di rumah dengan atap dari genteng (77,96 persen), selanjutnya seng (10,95 persen), dan yang terendah dari ijuk/rumbia/lainnya (0,65 persen). Bila dilihat menurut kabupaten/kota dapat dilihat Kabupaten Bangli dan Buleleng memiliki persentase rumah tangga terendah yang tinggal di rumah dengan atap dari genteng dibanding kabupaten/kota lainnya, yaitu masing-masing 64,51 persen dan 48,73 persen rumah tangga. Sebaliknya, rumah tangga yang rumahnya menggunakan atap dari seng di kedua kabupaten tersebut adalah yang tertinggi di Bali, yaitu masing-masing 21,68 persen dan 45,01 persen (lihat Lampiran Tabel A.2.). Kondisi ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa di dataran tinggi masyarakat cenderung menggunakan seng sebagai atap rumah. Bangli merupakan salah satu daerah yang

memiliki dataran tinggi luas di Bali, begitu juga dengan Kabupaten Buleleng. Buleleng berada di Bali bagian utara yang memiliki dataran landai yang sempit dan dataran tinggi yang luas (Daerah Dalam Angka Provinsi Bali tahun 2009).

3.2.4. Jenis Dinding Terluas

Agar memenuhi standar kesehatan, jenis dinding yang dipilih adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga dinding terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Jenis dinding rumah juga merupakan salah satu dari 14 kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah rumah tangga layak atau tidak menerima BLT pada tahun 2005.

Tabel 3.2. menunjukkan bahwa 95,23 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan dinding dari tembok dan hanya 4,77 persen yang tinggal di rumah yang bukan tembok seperti kayu, bambu, dan lainnya. Seperti yang diketahui rumah tradisional Bali memiliki ciri khas dinding rumah dari tembok.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana memiliki persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan dinding tembok terendah, yaitu masing-masing 88,17 persen dan 89,58 persen. Di Kabupaten Bangli, selain tembok, dinding rumah juga banyak terbuat dari kayu (5,66 persen) dan bambu (6,16 persen). Di Jembrana, selain tembok persentase rumah tangga yang tempat tinggalnya memiliki dinding dari bambu juga cukup besar, yaitu mencapai 9 persen. Secara lebih rinci, persentase rumah tangga menurut jenis dinding rumah dapat dilihat pada Lampiran Tabel A.3.

3.3. Fasilitas Rumah

Fasilitas rumah tidak hanya penting dari sisi kenyamanan penghuninya, namun yang tidak kalah penting adalah dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan diwujudkan dalam sarana sanitasi yang tersedia dalam setiap rumah. Dengan fasilitas yang memadai diharapkan dapat menunjang segala aktivitas penghuninya serta membantu penghuninya untuk hidup sehat. Berikut ini akan dibahas tiga

fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Tiga fasilitas dasar tersebut adalah penerangan, sumber air minum/air bersih, dan tempat buang air besar.

Tabel 3.3. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Bali Tahun 2012

Fasilitas Rumah	Persentase
(1)	(2)
Sumber penerangan	
- Listrik (PLN dan non PLN)	99,10
- Non listrik	0,89
Fasilitas air bersih	
- Sumber air minum	
• Terlindung	92,68
• Tidak terlindung	7,31
- Jarak pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat	
• ≤ 10 m	11,63
• > 10 m	73,95
• Tidak tahu	14,42
Fasilitas buang air besar	
- Ada	88,73
- Tidak ada	11,27

Sumber : Susenas 2012

3.3.1. Sumber Penerangan

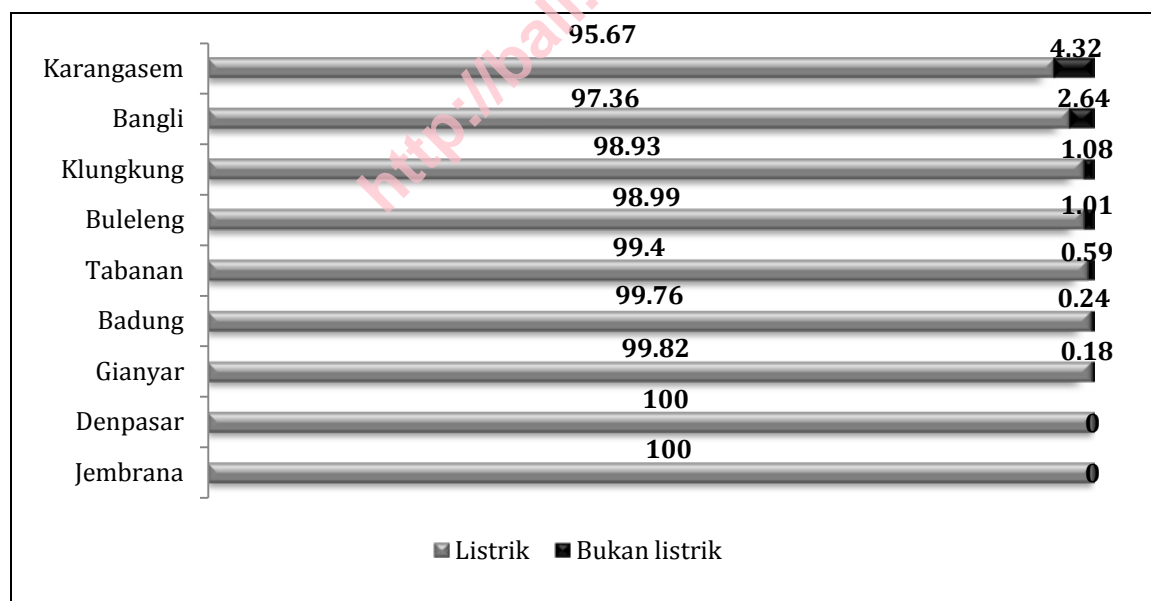
Sumber penerangan yang dicakup dalam publikasi ini adalah listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun non PLN, seperti sumber penerangan dari accu (aki), generator, pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN), dan pembangkit listrik tenaga air (yang tidak dikelola oleh PLN). Sedangkan, sumber penerangan bukan listrik meliputi petromak/aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya.

Penerangan rumah sangat penting dalam menunjang aktivitas para

penghuninya. Publikasi ini hanya mencakup sumber penerangan buatan karena sumber penerangan jenis ini mampu mendukung aktivitas penghuninya hingga malam hari, sedangkan sumber penerangan alami yaitu sinar matahari tidak dapat menerangi dalam rumah dan mendukung aktivitas penghuni pada malam harinya.

Listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat seiring perkembangan jaman. Sehingga tidak mengherankan jika hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swadaya sendiri. Seperti yang terlihat pada Tabel 3.3., rumah tangga di Bali yang menggunakan listrik sudah mencapai 99,10 persen. Ini berarti belum semua rumah tangga di Bali menikmati listrik yang terlihat dari persentase rumah tangga yang menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan sebesar 0,89 persen. Sumber penerangan bukan listrik yang digunakan oleh rumah-rumah tangga di Bali diantaranya pelita/sentir/obor dan lainnya.

Gambar 3.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2012



Sumber: Susenas 2012

Berdasarkan Gambar 3.2., pada tahun 2012, tercatat ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki rumah tangga yang belum menikmati penerangan dari listrik, yaitu Kabupaten Karangasem (4,32 persen), Kabupaten Bangli (2,64

persen), Kabupaten Klungkung (1,08 persen), Kabupaten Buleleng (1,01 persen), Kabupaten Tabanan (0,59 persen), Kabupaten Badung (0,24 persen), dan Kabupaten Gianyar (0,18 persen). Untuk mengetahui persentase rumah tangga menurut sumber penerangan bukan listrik yang digunakan secara lebih rinci di masing-masing kabupaten/kota, dapat dilihat pada Lampiran Tabel A.4.

3.3.2. Sumber Air Minum

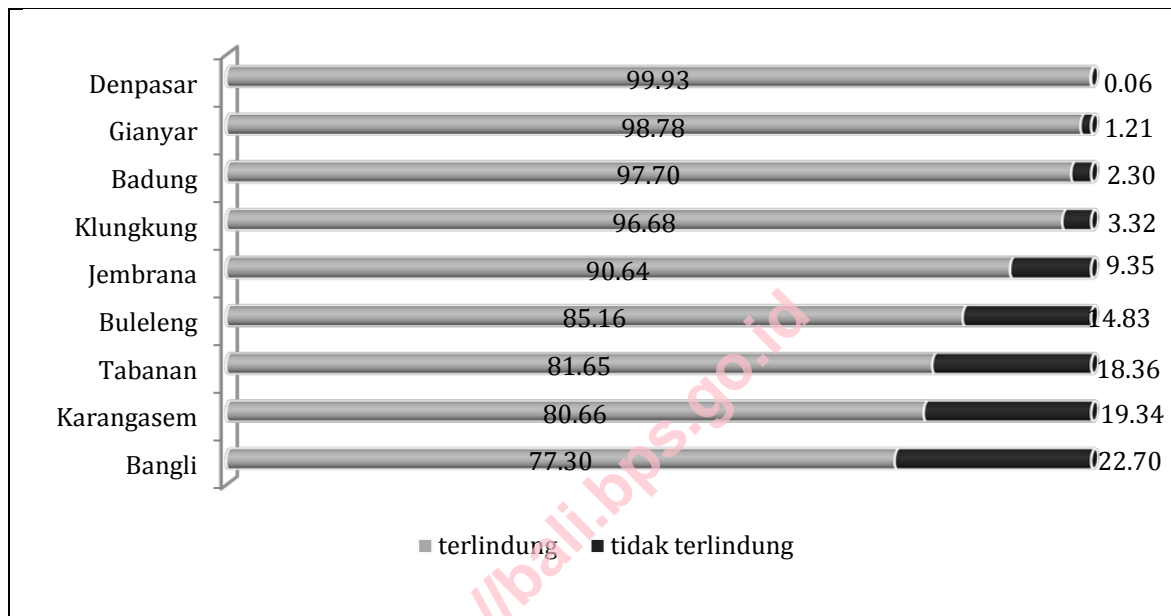
Air bersih adalah kebutuhan manusia yang paling dasar. Ketiadaan air bersih dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti diare dan cacangan. Ketersediaan air bersih kini menjadi salah satu prioritas utama program pembangunan mengingat ketersediaan air bersih yang semakin tidak berimbang dengan penambahan jumlah penduduk.

Ketersediaan air bersih di rumah tangga dapat dilihat dari sumber air minum yang digunakan dan jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Air bersih dikatakan tersedia dalam rumah tangga jika sumber air minumannya terlindung, seperti diperoleh dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sumber air minum terlindung tersebut dianggap merupakan sumber air bersih dengan catatan sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung memiliki jarak lebih dari 10 meter ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Bukan air bersih di sini mencakup sumber air minum tidak terlindung seperti sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya.

Pada tahun 2012, sebagian besar (92,68 persen) rumah tangga di Bali menggunakan sumber air minum terlindung, sedangkan sisanya (7,31 persen) menggunakan sumber air minum dari sumber tak terlindung (lihat Tabel 3.3.). Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tidak terlindung tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali dengan persentase rumah tangga terbesar di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 22,70 persen (lihat Gambar 3.3.). Penggunaan sumber air tak terlindung di Bangli bersumber dari mata air, air sungai,

dan air hujan (lihat Lampiran Tabel A.5.). Penggunaan air hujan disini tidak hanya mencakup yang diperoleh secara langsung dengan menampung air hujan, tetapi juga termasuk air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa ledeng.

Gambar 3.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Bali Tahun 2012



Sumber : Susenas 2012

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Departemen Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Berdasarkan Tabel 3.3., diketahui 73,95 persen rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja juga cukup banyak, yaitu mencapai 14,42 persen.

Aspek yang tidak kalah penting dalam penyediaan air minum bagi rumah tangga adalah bagaimana rumah tangga tersebut mendapatkan air minum, apakah membeli atau tidak. Air minum yang dikategorikan sebagai membeli antara lain

yang bersumber dari ledeng dari PAM/PDAM/BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah, sedangkan dikategorikan sebagai tidak membeli jika memperoleh air minum dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

Pada tahun 2010 sampai 2012, persentase rumah tangga di Bali yang mendapatkan air minum dengan cara membeli jauh lebih besar dibanding tidak membeli (lihat Lampiran Tabel A.7.). Persentase rumah tangga yang membeli berada di kisaran 60 persen. Sebagai contoh pada tahun 2012, persentase rumah tangga yang memperoleh air minum dengan membeli mencapai 66,35 persen dan sisanya 33,65 persen dengan cara tidak membeli.

Dari seluruh rumah tangga di sembilan kabupaten/kota di Bali, rumah tangga di Kota Denpasar adalah yang paling banyak memperoleh air minum dengan cara membeli (92,01 persen) dan yang terendah adalah di Kabupaten Jembrana (43,76 persen). Secara lebih rinci dapat dilihat di Lampiran Tabel A.7.

3.3.3. Fasilitas Buang Air Besar

Salah satu sarana sanitasi penting dalam rumah selain sarana air bersih adalah sarana pembuangan kotoran (jamban). Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999.

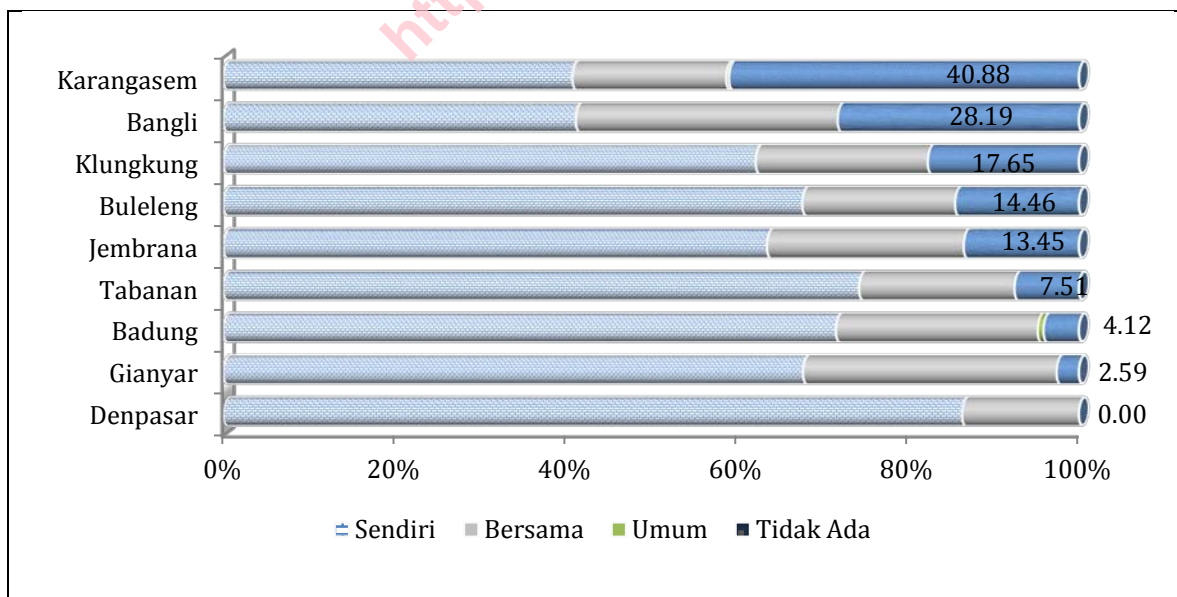
Berdasarkan Table 3.3. , persentase rumah tangga di Bali yang telah memiliki fasilitas buang air besar mencapai 88,73 persen, baik fasilitas sendiri, bersama maupun umum. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar jauh lebih tinggi dibanding dengan yang belum memiliki yang hanya mencapai 11,27 persen rumah tangga.

Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban, patut menjadi perhatian pemerintah karena sangat terkait dengan kesehatan penghuninya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kotoran yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebarkan oleh vektor

penyakit seperti lalat. Disamping itu juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkan. Menurut Keman (2005), penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menjadi faktor risiko terhadap penyakit diare (penyakit penyebab utama kematian balita) disamping penyakit cacangan yang menyebabkan produktivitas kerja menurun.

Rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tersebar di hampir seluruh kabupaten di Provinsi Bali, kecuali Kota Denpasar (lihat Gambar 3.4.). Dari delapan kabupaten tersebut, persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tertinggi ditemukan di Kabupaten Karangasem (40,88 persen), yang berturut-turut diikuti oleh Kabupaten Bangli (28,19 persen), Klungkung (17,65 persen), Buleleng (14,46 persen), Jembrana (13,45 persen), Tabanan (7,51 persen), Badung (4,12 persen), dan Gianyar (2,59 persen). Rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar ini mungkin membuang kotorannya langsung di kebun, sungai, sawah, atau tempat tertentu lainnya.

Gambar 3.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Bali Tahun 2012



Sumber : Susenas 2012

Aspek yang paling penting dari fasilitas pembuangan buang air besar adalah tempat pembuangan akhir tinja, apakah sudah menggunakan tangki/SPAL (Saluran Pembuangan Akhir Limbah), atau limbah dibuang ke kolam/sawah, sungai/danau/laut, ke dalam lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan tinja tersebut, SPAL yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja. Tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka tidak menimbulkan persoalan di perdesaan karena daya dukung lingkungannya masih memadai. Namun cara ini rentan menjadi penyebab penyakit, khususnya jika dalam tinja terkandung kuman penyakit, seperti disentri. Selain itu, cara ini mengurangi estetika lingkungan.

Gambar 3.5. memperlihatkan rumah tangga yang menggunakan tangki/SPAL cukup besar, yaitu mencapai 86,23 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan selain SPAL juga masih ada, seperti kolam/sawah (0,08%), lainnya (0,61%), lubang tanah (1,61%), sungai/danau/laut (3,99%), dan pantai/tanah lapang/kebun (7,48%).

Gambar 3.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Bali Tahun 2012



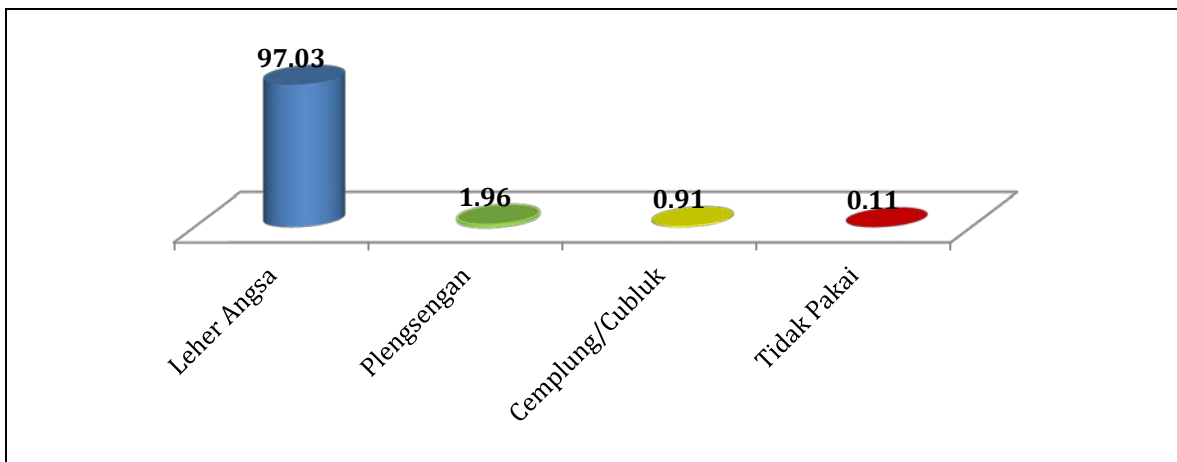
Sumber: Susenas 2012

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, kabupaten dengan persentase rumah tangga yang menggunakan SPAL terendah adalah Kabupaten Karangasem sebesar 57,46 persen dan Bangli sebesar 71,40 persen. Sementara itu di kabupaten/kota lainnya rumah tangga memakai SPAL sudah lebih dari 80 persen (lihat Lampiran Tabel A.10.).

Selanjutnya, komponen penting lain dari jamban adalah kloset. Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus yang dibedakan menjadi leher angsa, plengsengan, cemplung/cubluk, dan tidak memakai kloset. Kakus leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum, dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau, tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat, serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Gambar 3.6. menunjukkan bahwa sebagian besar (97,03 persen) rumah tangga di Bali sudah menggunakan leher angsa. Hasil Susenas 2012 menunjukkan ternyata masih ada rumah tangga yang menggunakan plengsengan (1,96 persen), cemplung/cubluk (0,91 persen), dan bahkan tidak pakai (0,11 persen) walaupun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan yang menggunakan leher angsa.

Gambar 3.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset di Provinsi Bali Tahun 2012



Sumber: Susenas 2012

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rumah yang nyaman dan sehat dapat diukur dari aspek kualitas dan fasilitas rumah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas dan fasilitas rumah di Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali, maka digunakan beberapa indikator yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012.

Berdasarkan hasil Susenas 2012, ada kecenderungan rumah tangga di Provinsi Bali lebih memilih tinggal di rumah milik sendiri (baik yang dimiliki oleh kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga lainnya). Lain halnya di Kota Denpasar, rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri, seperti mengontrak dan menyewa lebih banyak dibanding yang tinggal di rumah milik sendiri.

Dari sisi kualitas, mayoritas rumah di Provinsi Bali menunjukkan kualitas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator perumahan. Beberapa indikator perumahan menunjukkan tanda positif, seperti sebagian besar rumah sudah memiliki lantai dengan luas lebih dari 20 meter persegi, berlantai bukan dari tanah, beratap dari genteng, dan berdinding dari tembok. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, ada beberapa kabupaten yang nilai indikatornya lebih rendah dibanding kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Bangli. Kedua kabupaten tersebut memiliki persentase rumah tangga yang rumahnya berlantai bukan tanah terendah, memiliki persentase rumah tangga yang rumahnya beratap genteng terendah, serta memiliki persentase rumah tangga yang rumahnya berdinding tembok terendah.

Dari sisi fasilitas juga menunjukkan kondisi yang cukup baik. Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Bali telah memiliki fasilitas rumah yang memadai dan memenuhi aspek kesehatan, seperti sebagian besar sudah menggunakan listrik

sebagai sumber penerangan utama, menggunakan air minum dari sumber terlindung, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja yang telah memenuhi standar kesehatan (> 10 meter), dan telah memiliki fasilitas buang air besar, baik yang merupakan milik sendiri, milik bersama (dimiliki bersama oleh beberapa rumah tangga), dan umum. Namun, rumah tangga yang masih belum menggunakan listrik, masih minum dari sumber tak terlindung, dan belum memiliki jamban masih cukup banyak yang tersebar di beberapa kabupaten di Bali. Diantaranya yang patut menjadi perhatian adalah Kabupaten Karangasem dan Bangli yang merupakan kabupaten dengan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, sumber air minumnya terlindung, dan ketersediaan jamban yang terendah di Provinsi Bali.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan beberapa indikator perumahan yang telah dibahas sebelumnya,, ada beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian oleh semua pihak, khususnya pemangku kebijakan di bidang pembangunan perumahan di Provinsi Bali. Beberapa saran dan rekomendasi tersebut adalah:

1. Melihat masih ada rumah tangga yang tinggal di rumah dengan kualitas yang kurang memadai dan belum layak dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan perumahan yang layak dan terjangkau, contohnya perbaikan rumah melalui program bedah rumah, atau bahkan menyediakan perumahan murah dan sederhana yang terjangkau serta memenuhi standar hidup layak dan standar kesehatan.
2. Masih adanya rumah tangga yang belum menggunakan listrik dan belum tersedianya air bersih mungkin tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, namun mungkin saja karena belum tersedianya infrastruktur yang memadai sehingga patut menjadi perhatian, misalnya dengan membangun jaringan listrik, penyediaan air bersih, dan sejenisnya, terutama di kabupaten/kota yang kondisinya lebih buruk dibanding kabupaten/kota lainnya.

3. Disamping infrastruktur inti perumahan, yang tidak kalah penting adalah infrastruktur pendukung seperti infrastruktur di bidang pendidikan (contohnya pembangunan sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat miskin), bidang ekonomi, dan sosial budaya perlu diintegrasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan lingkungan.

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2009. Daerah Dalam Angka Provinsi Bali 2009. Denpasar: BPS.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2012. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2007-2011. Denpasar: BPS.

Keman, Soedjadi.2005. Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 2 No. 1 Hal. 29-42*. FKM Universitas Airlangga.

Republik Indonesia.2011. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.1999. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Sekretariat Kabinet RI.Jakarta.

LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

Tabel A.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Luas Lantai				
	< 20 m ²	20 – 49 m ²	50 – 99 m ²	100 – 149 m ²	>= 150 m ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Jembrana	2,09	37,85	44,26	12,08	3,71
02. Tabanan	5,76	22,74	51,33	13,38	6,80
03. Badung	17,78	14,07	45,44	15,73	6,98
04. Gianyar	8,63	16,40	46,21	18,18	10,59
05. Klungkung	3,97	27,95	45,44	15,57	7,08
06. Bangli	5,98	45,66	38,61	6,81	2,94
07. Karangasem	9,31	50,38	32,27	6,17	1,87
08. Buleleng	7,56	44,40	36,54	7,50	4,00
71. Denpasar	31,41	15,80	18,97	16,73	17,09
51. Bali 2012	13,93	28,07	36,87	12,94	8,19
2011	18,03	28,66	34,51	11,51	7,29
2010	18,06	27,25	34,91	11,83	7,95

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal						
	Beton	Genteng	Sirap	Seng	Asbes	Ijuk/ Rumbia	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Jembrana	0,62	98,14	0,00	0,14	1,10	0,00	0,00
02. Tabanan	2,51	88,54	0,09	5,61	3,25	0,00	0,00
03. Badung	1,72	90,26	0,14	0,66	7,22	0,00	0,00
04. Gianyar	2,40	94,19	0,45	1,02	1,79	0,00	0,15
05. Klungkung	1,96	88,31	0,00	2,41	6,31	0,16	0,85
06. Bangli	0,40	64,51	0,00	21,68	12,13	0,00	1,28
07. Karangasem	0,97	75,60	0,61	8,65	10,31	3,39	0,47
08. Buleleng	3,15	48,73	0,17	45,01	2,53	0,41	0,00
71. Denpasar	1,74	75,56	0,00	2,63	19,81	0,13	0,13
51. Bali 2012	1,89	77,96	0,17	10,95	8,38	0,45	0,20
2011	1,89	77,96	0,17	10,95	8,38	0,45	0,20
2010	1,65	77,89	0,07	11,29	8,11	0,68	0,31

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas			
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Jembrana	89,58	1,42	9,00	0,00
02. Tabanan	95,70	0,84	3,46	0,00
03. Badung	97,71	1,67	0,45	0,16
04. Gianyar	99,20	0,55	0,25	0,00
05. Klungkung	98,73	0,21	0,89	0,17
06. Bangli	88,17	5,66	6,16	0,00
07. Karangasem	91,44	0,28	7,10	1,18
08. Buleleng	93,57	1,52	4,18	0,73
71. Denpasar	97,27	1,76	0,86	0,11
51. Bali 2012	95,23	1,47	3,01	0,29
2011	93,77	1,96	3,89	0,38
2010	93,71	2,21	3,68	0,40

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan Utama				
	PLN	Non PLN	Petromak/Aladin	Pelita/Sentir/ Obor	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Jembrana	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Tabanan	99,19	0,21	0,00	0,59	0,00
03. Badung	99,76	0,00	0,00	0,24	0,00
04. Gianyar	99,62	0,20	0,00	0,18	0,00
05. Klungkung	96,62	2,31	0,00	1,08	0,00
06. Bangli	97,36	0,00	0,00	2,64	0,00
07. Karangasem	95,28	0,39	0,00	4,02	0,30
08. Buleleng	98,99	0,00	0,00	0,74	0,27
71. Denpasar	98,94	1,06	0,00	0,00	0,00
51. Bali 2012	98,68	0,42	0,00	0,82	0,07
2011	97,90	0,95	0,02	1,07	0,05
2010	96,83	0,89	0,24	1,93	0,11

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Air Kemas	Ledeng Meteran	Ledeng Eceran	Pompa	Sumur Terlingdung	Sumur Tdk Terlingdung	Mata Air Terlingdung	Mata Air Tak Terlingdung	Air Sungai	Air Hujan	Air Lainnya	
01. Jembrana	19,49	21,69	0,00	9,04	27,02	3,48	7,92	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00
02. Tabanan	17,30	38,68	0,00	7,52	4,75	0,30	28,43	0,89	2,13	0,00	0,00	0,00
03. Badung	55,66	4,33	0,00	5,83	10,09	0,23	21,79	1,41	0,00	0,66	0,00	0,00
04. Gianyar	22,01	30,35	0,29	12,88	10,32	0,00	22,93	0,70	0,51	0,00	0,00	0,00
05. Klungkung	12,45	48,82	2,17	1,74	5,33	0,00	11,14	0,00	0,26	18,10	0,00	0,00
06. Bangli	4,34	37,74	0,43	3,43	0,13	0,00	31,23	6,71	0,52	15,47	0,00	0,00
07. Karangasem	4,55	35,05	1,34	1,96	13,61	1,12	24,15	2,57	0,40	15,25	0,00	0,00
08. Buleleng	10,23	42,62	1,11	3,61	6,46	0,57	26,61	6,89	1,60	0,29	0,00	0,00
71. Denpasar	87,69	4,07	0,15	4,81	2,86	0,00	0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Bali 2012	36,07	24,55	0,49	5,65	8,12	0,51	17,80	2,11	1,38	3,31	0,00	0,00
2011	32,82	24,93	1,03	5,15	10,87	0,83	16,22	3,97	0,97	3,20	0,01	0,01
2010	33,54	21,22	1,11	4,28	10,39	0,94	18,95	4,17	1,70	3,61	0,09	0,09

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Pembuangan Tinja		
	< = 10 m	> 10 m	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Jembrana	26,36	61,60	12,04
02. Tabanan	10,98	84,49	4,53
03. Badung	9,77	54,59	35,63
04. Gianyar	14,55	81,01	4,44
05. Klungkung	10,81	89,20	0,00
06. Bangli	0,00	80,55	19,45
07. Karangasem	3,90	69,37	26,73
08. Buleleng	4,05	89,46	6,49
71. Denpasar	47,38	49,07	3,54
51. Bali 2012	11,63	73,95	14,42
2011	11,69	66,75	21,57
2010	11,89	65,91	22,20

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Cara Memperoleh	
	Membeli	Tidak Membeli
(1)	(2)	(3)
01. Jembrana	43,76	56,24
02. Tabanan	63,65	36,35
03. Badung	62,94	37,06
04. Gianyar	57,19	42,81
05. Klungkung	64,65	35,35
06. Bangli	65,58	34,42
07. Karangasem	49,85	50,15
08. Buleleng	61,24	38,76
71. Denpasar	92,01	7,99
51. Bali 2012	66,35	33,65
2011	63,59	36,41
2010	67,04	32,96

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Air Minum di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Penggunaan Fasilitas Air Minum			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Jembrana	62,58	35,66	1,08	0,68
02. Tabanan	62,02	24,90	12,69	0,39
03. Badung	36,32	23,61	40,07	0,00
04. Gianyar	42,36	34,44	22,62	0,59
05. Klungkung	52,42	37,45	9,43	0,69
06. Bangli	36,77	30,28	18,75	14,19
07. Karangasem	47,34	31,07	20,16	1,43
08. Buleleng	63,93	23,57	7,63	4,88
71. Denpasar	73,60	23,76	2,64	0,00
51. Bali 2012	53,17	28,65	15,48	2,70
2011	55,01	29,66	12,41	2,91
2010	51,37	33,22	13,45	1,96

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Jembrana	63,55	22,99	0,00	13,45
02. Tabanan	74,33	18,16	0,00	7,51
03. Badung	71,62	23,58	0,68	4,12
04. Gianyar	67,76	29,64	0,00	2,59
05. Klungkung	62,24	20,11	0,00	17,65
06. Bangli	41,21	30,61	0,00	28,19
07. Karangasem	40,81	17,98	0,34	40,88
08. Buleleng	67,69	17,85	0,00	14,46
71. Denpasar	86,37	13,63	0,00	0,00
51. Bali 2012	68,50	20,10	0,13	11,27
2011	65,50	20,72	0,67	13,12
2010	63,42	20,89	0,20	15,50

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.10. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja					
	Tangki/ SPAL	Kolam /Sawah	Sungai/Danau /Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lain nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Jembrana	85,18	0,19	3,75	1,10	9,78	0,00
02. Tabanan	90,45	0,04	8,13	0,86	0,52	0,00
03. Badung	93,89	0,21	4,09	1,50	0,18	0,13
04. Gianyar	97,41	0,00	2,49	0,00	0,00	0,10
05. Klungkung	81,76	0,00	4,30	0,48	13,46	0,00
06. Bangli	71,40	0,23	1,01	0,18	27,18	0,00
07. Karangasem	57,46	0,23	9,56	0,63	31,32	0,80
08. Buleleng	81,99	0,00	5,18	3,35	9,10	0,38
71. Denpasar	95,03	0,00	0,22	2,64	0,18	1,93
51. Bali 2012	86,23	0,08	3,99	1,61	7,48	0,61
2011	85,15	0,19	4,38	1,43	8,60	0,24
2010	82,80	0,28	5,83	1,07	9,77	0,24

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.11. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset di Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset			
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/Cubluk	Tidak Pakai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Jembrana	98,42	0,61	0,98	0,00
02. Tabanan	98,83	0,35	0,82	0,00
03. Badung	100,00	0,00	0,00	0,00
04. Gianyar	99,46	0,55	0,00	0,00
05. Klungkung	99,70	0,00	0,16	0,14
06. Bangli	100,00	0,00	0,00	0,00
07. Karangasem	98,87	0,56	0,00	0,57
08. Buleleng	94,77	3,26	1,57	0,40
71. Denpasar	93,06	4,97	1,98	0,00
51. Bali 2012	97,03	1,96	0,91	0,11
2011	97,58	1,40	0,67	0,11
2010	94,88	2,33	2,66	0,13

Sumber : Susenas 2012

Tabel A.12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Bali 2007-2011

Lapangan Usaha	Harga Konstan 2000		
	2009	2010	2011*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutan, dan Perikanan	5.68	1,76	2.23
2. Pertambangan dan Penggalian	5.27	19.43	10.51
3. Industri Pengolahan	5.43	6.08	3.12
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.71	6.88	7.35
5. Bangunan	0.91	7.37	7.88
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6.23	6.39	8.65
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5.10	5.77	5.97
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	2.63	7.47	6.22
9. Jasa-jasa	5.64	8.60	9.97
PDRB	5.33	5.83	6.49
PDRB Tanpa Migas	5.33	5.83	6.49

Sumber: Bappeda Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali, 2012
Ket: *) angka sementara

<http://bali.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**
Jl. Raya Puputan (Renon) Denpasar 80226
Telp. (0361) 238159 Fax. (0361) 238162
Email: bps5100@bps.go.id
<http://bali.bps.go.id>